

# STRATEGI OPTIMALISASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN MELALUI PT POS INDONESIA DI KOTA BANDUNG

Raisa Adisti<sup>1\*</sup>, Egia Rizky Priangga<sup>2</sup>, Gilang Nur Alam<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

<sup>2</sup> PT. Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

<sup>1</sup> raisa21004@mail.unpad.ac.id\*

Received: Desember, 2024; Accepted: Mei, 2025

## Abstract

The distribution of Social Assistance (Bansos) in Bandung City is one of the innovations of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia to combat poverty and optimize community welfare. PT Pos Indonesia is a company under the auspices of a State-Owned Enterprise (BUMN) that is trusted by the government to be one of the agencies that distributes the Family Hope Program (PKH) Social Assistance in Bandung City. This article aims to identify various strategies in optimizing the distribution of Social Assistance (PKH) in Bandung City through PT Pos Indonesia. The research was conducted using a qualitative method with data collection through in-depth interviews, observations, and analysis of related documents. The aim is to prove that the implementation of the strategy for optimizing the distribution of Social Assistance by PT Pos Indonesia in Bandung City is in accordance with the efficiency and effectiveness of the distribution of Social Assistance.

**Keywords:** Social Assistance, PT Pos Indonesia, Bandung City

## Abstrak

Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Kota Bandung merupakan salah satu inovasi Kementerian Sosial Republik Indonesia guna memerangi kemiskinan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. PT Pos Indonesia merupakan perusahaan dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercaya pemerintah untuk menjadi salah satu badan yang menyalurkan Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandung. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai strategi dalam mengoptimalkan penyaluran Bansos (PKH) di Kota Bandung melalui PT Pos Indonesia. Dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Tujuannya adalah membuktikan bahwa implementasi strategi optimalisasi penyaluran Bansos oleh PT Pos Indonesia di Kota Bandung telah sesuai dengan efisiensi dan efektivitas penyaluran Bansos.

**Kata Kunci:** Bantuan Sosial, PT Pos Indonesia, Kota Bandung

*How to Cite:* Adisti, R., Priangga, E.R. & Alam, G.N. (2025). Strategi Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Melalui PT Pos Indonesia Di Kota Bandung. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 8 (2), 398-404.

## PENDAHULUAN

Bantuan Sosial (Bansos) merupakan salah satu inovasi utama yang dicetuskan oleh pemerintah Indonesia, tepatnya Kementerian Sosial RI (Kemensos) dengan tujuan memerangi kemiskinan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat (Kemensos, 2023). Bansos diberikan secara selektif kepada masyarakat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Program Bansos terinspirasi dari konsep Welfare State, yang mana dijelaskan bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya (Alfitri, 2021). Bantuan sosial terdiri dari berbagai macam bantuan, salah

satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sesuai dengan syarat dan ketentuan. PKH dibuat sebagai program yang dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia (Kemensos, 2021). PKH memberikan kemudahan bagi keluarga miskin di Indonesia dengan mengadakan berbagai fasilitas kesejahteraan. Selain keluarga miskin, PKH juga diberikan kepada ibu hamil, anak usia dini, SD, SMP, SMA, penyandang disabilitas berat, dan orang lanjut usia, tentunya yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Biasanya, PKH diberikan per-triwulan selama setahun, yaitu dimulai pada bulan Januari, April, Juli, dan terakhir Oktober. Alur penyaluran Bansos PKH akan diberikan kepada KPM melalui Bank Milik Negara secara transfer bagi KPM yang memiliki rekening. Sedangkan, bagi KPM yang tidak memiliki rekening dapat mengambil Bansos PKH melalui Kantor Pos yang sudah ditentukan dan dijadwalkan. Pada dunia internasional, PKH disebut dengan Conditional Cash Transfer dan dianggap sebagai program yang berhasil mengikis angka kemiskinan di dunia (Kemensos, 2021). Kota Bandung, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, menghadapi tantangan khusus dalam memastikan Bansos PKH tepat sasaran dan tepat waktu sampai kepada yang berhak menerimanya. Penyaluran Bansos PKH di Kota Bandung setidaknya mencapai 23.000 KPM.

Pada tahun 2023 lalu, Kementerian Sosial RI (Kemensos) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menandatangani kerja sama alur penyaluran Bansos PKH melalui PT Pos Indonesia. Peresmian kerja sama ini merupakan capaian dari diskusi antara Menteri Sosial RI, yaitu Tri Rismaharini dengan Wakil Menteri BUMN, yaitu Kartika Wirjoatmodjo (Kemensos, 2023). Bagi KPM yang tidak mengambil Bansos PKH dalam waktu yang tepat, maka pengambilan Bansos PKH akan dialihkan kepada PT Pos Indonesia (Rismaharini, 2023). Kemensos RI telah memercayai PT Pos Indonesia sebagai salah satu agen yang dapat menyalurkan Bansos kepada masyarakat. Kepercayaan ini didasari dari luasnya jaringan dan infrastruktur yang dimiliki PT Pos Indonesia, yang dapat menjangkau berbagai lokasi di Indonesia. PT Pos Indonesia telah lama beroperasi di Indonesia dan memiliki koneksi kantor cabang yang menyebar di seluruh kota dan desa di Indonesia (Pos Indonesia, 2021).

Teknologi dan sistem manajemen yang diaplikasikan oleh PT Pos Indonesia di Kota Bandung telah mencakup dari database penerima Bansos PKH, sistem pelaporan, hingga transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran Bansos PKH. Proses penyaluran Bansos PKH di Kota Bandung bertempat di Kantor Pos Cabang Utama Kota Bandung (KCU Bandung) yang berada di Jl. Asia Afrika No.49. Ketika proses penyaluran Bansos PKH sedang berlangsung, PT Pos Indonesia akan memastikan bahwa Bansos yang disalurkan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pemerintah. PT Pos Indonesia bekerja secara erat dengan Kementerian Sosial RI dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan dan pelaksanaan program Bansos. Kerja sama ini mencakup koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Bansos guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, keterlibatan PT Pos Indonesia sebagai agen penyaluran Bansos dari Kementerian Sosial RI telah mendukung keberhasilan implementasi program-program bansos di Indonesia.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Metode kualitatif diaplikasikan untuk melengkapi pemahaman mendalam mengenai fenomena optimalisasi penyaluran Bansos PKH melalui PT Pos Indonesia di Kota Bandung. Proses tersebut melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data mulai dari tema-tema

yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data (Cresswell, 2010). Pada jurnal ini penulis mengaplikasikan teknik studi literatur dan wawancara. Teknik-teknik tersebut dapat membantu memperoleh data yang lebih kredibel (Lamont, 2015). Teknik wawancara dapat dimulai dengan memilih target narasumber dan narasumber disebut sebagai purposive sampling. Wawancara dijalankan untuk mendapatkan informasi kredibel dari narasumber yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai penyaluran bansos melalui PT Pos Indonesia di Kota Bandung.

Pada jurnal ini, wawancara akan dilakukan dengan narasumber Egia Rizky Priangga sebagai Manajer Penjualan Bisnis Jasa Keuangan di Kantor Cabang Utama Kota Bandung PT Pos Indonesia. Narasumber tersebut merupakan ketua satuan tugas (Satgas) pelaksanaan penyaluran Bansos melalui PT Pos Indonesia di Kota Bandung. Penulis memilih narasumber berdasarkan pengalaman narasumber di bidang ini dan dapat memberikan wawasan langsung dari perspektif internal dan eksternal perusahaan. Kemudian, penulis akan menyempurnakan hasil wawancara dengan observasi serta analisis dokumen terkait. Observasi dilakukan untuk mengamati praktik dan strategi penyaluran Bansos PKH melalui PT Pos Indonesia di Kota Bandung. Hal ini bertujuan memberikan perspektif baru mengenai strategi yang dibutuhkan dan perbaikan dalam penyaluran Bansos PKH melalui PT Pos Indonesia di Kota Bandung. Kredibilitas informasi akan disesuaikan dengan berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan penyaluran Bansos PKH melalui PT Pos Indonesia di Kota Bandung yang dikeluarkan oleh instansi resmi. Dokumen tersebut mencakup laporan PT Pos Indonesia, kebijakan pemerintah mengenai Bansos, dan penelitian akademis yang berkaitan. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif yang disertakan teknik wawancara, observasi, dan analisis mendalam, Jurnal ini akan menghasilkan pembahasan yang komprehensif mengenai strategi optimalisasi penyaluran Bansos PKH melalui PT Pos Indonesia di Kota Bandung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyaluran Bansos PKH di Kota Bandung merupakan salah satu penugasan pengabdian masyarakat yang dibuat oleh Pemerintah. PT Pos Indonesia sudah menjadi salah satu perusahaan BUMN yang dipercayai oleh Pemerintah dalam mendistribusikan Bansos PKH, termasuk di Kota Bandung. PT Pos Indonesia memiliki sebaran kantor yang dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah di Kota Bandung. Selain sebaran kantor tersebut, PT Pos Indonesia juga memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang teruji untuk melakukan penyaluran Bansos PKH, baik secara komunitas maupun home visit (Priangga, 2024). Maka, kedua faktor tersebut telah menjadi kunci utama yang mendukung efektivitas dan efisiensi penyaluran Bansos PKH dari PT Pos Indonesia. Ketika menyalurkan Bansos PKH, PT Pos Indonesia seringkali dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya, permasalahan krusial terjadi di lapangan di saat waktu pembagian Bansos PKH sedang berlangsung. Permasalahan yang terjadi di lapangan dapat meliputi, penerima Bansos PKH tidak membawa dokumen asli untuk verifikasi data, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Bansos PKH diambil oleh saudara yang identitasnya tidak termasuk dalam satu KK, dan misinformasi pembagian Surat Pengantar (SP) Bansos PKH dari pihak Kelurahan/Kecamatan dengan pihak PT Pos Indonesia. Kemudian, permasalahan yang terjadi di luar lapangan dapat meliputi, penerima Bansos PKH sudah pindah tempat tinggal (karena mengontrak), meninggal, menikah di usia muda, putus sekolah, dan perubahan di dalam dokumen pribadi yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan penerima Bansos PKH. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyaluran Bansos PKH disebabkan oleh informasi database penerima Bansos PKH yang tidak terbaru secara berkala (BBC Indonesia, 2020). Selain itu, permasalahan eksternal juga dapat terjadi, seperti pemalsuan data kriteria penerima

PKH oleh pendamping maupun aparat berwenang yang menyebabkan dana bantuan diterima oleh pihak yang tidak berhak (Robot & Toreh, 2020). Dari berbagai permasalahan tersebut, dapat dipastikan bahwa penyaluran Bansos PKH masih belum efektif, karena masih terjadi manipulasi data dan penyelewengan bantuan. Akibatnya, banyak ditemukan penerima Bansos PKH fiktif, sehingga masyarakat yang seharusnya menerima manfaat menjadi terabaikan dari kebijakan Pemerintah. Menanggapi hal tersebut, PT Pos Indonesia terus memberikan inovasi dan solusi untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang terjadi ketika penyaluran Bansos PKH yang didistribusikan dengan memaksimalkan strategi optimalisasi yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia.

### ***Strategi optimalisasi PT Pos Indonesia sebagai lembaga penyalur Bansos PKH di Kota Bandung***

Bansos PKH yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia di Kota Bandung bertempat di KCU Pos Kota Bandung, yang berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 49. Bagi kecamatan yang berada di ujung-ujung Kota Bandung, penyaluran Bansos PKH akan dialihkan kepada Kantor Cabang Pos (KC) terdekat. Bagi KPM yang sakit, disabilitas, dan lansia yang tidak memungkinkan mengambil Bansos PKH secara langsung, dapat mengajukan home visit kepada pihak PT Pos Indonesia melalui pendamping atau RT/RW domisili KPM. Selain itu, penyaluran Bansos PKH juga dapat diadakan melalui komunitas, yang bertempat di Kelurahan/Kecamatan yang sudah dikoordinasikan. Penyaluran Bansos PKH ini akan ditentukan jadwal penyalurannya oleh pihak PT Pos Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Kemudian, jadwal yang sudah dibuat akan didistribusikan kepada pendamping atau petugas Dinas Sosial Kecamatan di Kota Bandung. Pihak PT Pos Indonesia akan mencetak data SP dari seluruh KPM Bansos PKH, SP yang sudah dicetak akan diberikan kepada Kelurahan/Kecamatan di seluruh Kota Bandung, pihak Kelurahan/Kecamatan akan membantu menyebarkan SP kembali kepada RT/RW setempat, lalu SP diberikan kepada KPM oleh RT/RW. Petugas juga wajib memberitahukan dimana lokasi pengambilan Bansos PKH berlangsung. PT Pos Indonesia juga dapat mengatur jadwal pengambilan Bansos PKH, baik di KCU, KC, Komunitas, dan home visit (Priangga, 2024). PT Pos Indonesia sebagai lembaga penyalur Bansos cakupannya sebatas dari koordinasi penyediaan dana penyaluran (dari Bank) dan proses penyaluran kepada KPM. Biasanya, dilakukan dengan koordinasi kepada Dinas Sosial Kota Bandung serta para pendamping sosial di Kecamatan, agar seluruh tahapan proses penyaluran dapat berjalan dengan efektif dan efisien kepada KPM (Priangga, 2024).

PT Pos Indonesia mempunyai aplikasi khusus dalam menyalurkan Bansos, termasuk Bansos PKH. Aplikasi ini bernama Pos Giro Cash (PGC) yang didesain khusus oleh PT Pos Indonesia untuk tenaga kerja PT Pos Indonesia dalam mendistribusikan Bansos. Dengan menggunakan aplikasi PGC, penyaluran Bansos PKH dapat berjalan dengan efisien dan transparan, karena dapat mengetahui serapan Bansos PKH yang dibagikan setiap periodenya (Priangga, 2024). Database dari KPM Bansos PKH sudah terdapat dalam aplikasi ini. Ketika penyaluran Bansos PKH sedang berlangsung, aplikasi ini akan mencocokkan SP yang dibawa KPM dengan data identitas kependudukan KPM melalui barcode yang terdapat di SP. Hal tersebut dapat mengurangi risiko kesalahan penyaluran Bansos PKH kepada yang bukan KPM. Aplikasi ini dapat diakses oleh Pemerintah guna memonitor daya serap dan lokasi penyaluran Bansos PKH, sehingga Pemerintah dapat memastikan bahwa dana Bansos PKH telah disalurkan kepada KPM yang tepat (Priangga, 2024). Kemudian, untuk memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas mengenai uang Bansos PKH, PT Pos Indonesia menyediakan laporan 'Neraca Harian' yang berguna untuk merekapitulasi berapa uang yang diambil dari Bank untuk kegiatan

penyaluran Bansos PKH, dan berapa uang yang sudah terpakai atau dana yang sudah tersalurkan kepada KPM Bansos PKH.

Mekasnisme penyaluran Bansos PKH melalui PT Pos Indonesia di Kota Bandung melibatkan tenaga kerja PT Pos Indonesia sebagai Juru Bayar (Jubar) dana Bansos PKH, petugas harian untuk verifikasi data, dan aparat keamanan untuk memastikan kegiatan penyaluran Bansos PKH dapat berjalan dengan kondusif. KPM dari Kecamatan Andir, Astana Anyar, Babakan Ciparay, Bandung Kidul, Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Cicendo, Coblong, Kiaracondong, Lengkong, Rancasari, Regol, Sukajadi, Sukasari, dan Sumurbandung, akan mengambil langsung Bansos PKH mereka di KCU Pos Kota Bandung yang disesuaikan dengan waktu dan hari pengambilan. Biasanya, satu hari akan diisi dengan dua kecamatan dan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi dan siang. KPM dari Kecamatan Antapani, Arcamanik, Buahbatu, Cibiru, Cinambo, Gedebage, Mandalajati, Panyileukan, Ujungberung, akan mengambil langsung Bansos PKH mereka di KC yang ditentukan dan disesuaikan dengan waktu dan hari pengambilan. Apabila ada permintaan dari pihak Kelurahan/Kecamatan yang ingin mengadakan kegiatan penyaluran Bansos PKH di tempat Kelurahan/Kecamatan, maka dianggap sebagai penyaluran Bansos PKH oleh komunitas. PT Pos Indonesia melakukan prioritas area dengan melihat dari jumlah sebaran KPM setiap Kecamatan nya. Untuk Kecamatan yang memiliki banyak KPM, akan kita utamakan dengan jumlah SDM (tenaga penyalur) yang banyak terlibat, serta tim keamanan di tingkatkan agar dalam proses pelaksanaan penyaluran Bansos PKH dapat berjalan dengan lancar. PT Pos Indonesia selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial serta para pendamping sosial di tingkat Kecamatan mengenai jadwal penyaluran Bansos PKH, agar seluruh KPM dapat hadir sesuai dengan penjadwalan Kecamatan. Hal tersebut dilakukan agar percepatan penyaluran bantuan dapat dilakukan, serta efisiensi biaya dapat di tekan dengan baik (Priangga, 2024).

Alur pengambilan Bansos PKH melalui PT Pos Indonesia di Kota Bandung dimulai dengan KPM datang ke tempat, mengambil nomor antrian, memverifikasi data, dan apabila data yang diverifikasi sesuai maka dana akan dicairkan oleh Jubar yang berwenang. Permasalahan yang ditemui ketika menyalurkan Bansos PKH di KCU Pos Kota Bandung adalah manipulasi data dan penerima fiktif. Untuk itu, strategi optimal yang digunakan adalah dengan penguatan verifikasi dan validasi data, serta penguatan teknologi aplikasi yang digunakan. PT Pos Indonesia mempunyai website PGC, yang berisikan master data dari KPM Bansos PKH dari awal periode pembagian hingga periode yang sedang berlangsung. Apabila ada KPM yang memanipulasi data, petugas PT Pos Indonesia dapat memeriksa riwayat penerimaan Bansos PKH KPM melalui PGC, dengan menginput NIK KPM dan diakhiri dengan kode huruf periode pencairan. Data dalam PGC akan menunjukkan NIK, nama KPM, waktu dan tanggal penerimaan, nominal, serta dokumentasi diri KPM yang difotokan oleh Jubar saat penerimaan Bansos PKH. Dengan data yang lengkap di dalam PGC, maka permasalahan manipulasi data dan penerima fiktif dapat diminamisiir dan berkurang secara berkala.

PT Pos Indonesia menerapkan mekanisme penyaluran Bansos PKH secara home visit. Home visit merupakan upaya untuk memaksimalkan tersalurnya Bansos PKH kepada KPM, karena KPM sakit disabilitas, dan lansia yang tidak memungkinkan mengambil Bansos PKH secara langsung. Alur mekanisme penyaluran Bansos PKH home visit dimulai dari KPM yang melaporkan kondisinya kepada RT/RW setempat, KPM dapat memberikan fotokopi KTP dan KK kepada RT/RW sebagai data home visit. Lalu, RT/RW dapat datang ke lokasi penyaluran Bansos PKH yang sedang berlangsung, untuk memberikan data KTP dan KK KPM yang ingin di salurkan Bansos PKH nya melalui home visit. Nantinya, petugas dari PT Pos Indonesia akan

merekapitulasi data KPM home visit dari seluruh kecamatan di Kota Bandung. Kemudian, petugas akan memulai kegiatan home visit ketika periode penyaluran Bansos PKH di Kantor Pos sudah selesai.

Ketika periode penyaluran telah selesai, petugas PT Pos Indonesia akan memeriksa KPM yang tidak mengambil Bansos PKH selama waktu yang telah ditentukan. Biasanya, pendamping dari Dinas Sosial Kecamatan Kota Bandung akan melaporkan status KPM yang tidak mengambil. Kemudian, PT Pos Indonesia akan membuat Berita Acara (BA) yang diteruskan kepada Kelurahan/Kecamatan agar dapat mengonfirmasi status KPM yang telah dilaporkan. Apabila KPM ternyata ada di tempat sesuai domisili, maka KPM dapat mengambil Bansos PKH di Kantor Pos. Sedangkan, apabila KPM tidak diketahui keberadaanya atau meninggal, pihak Kelurahan/Kecamatan dapat kembali melaporkan BA kepada Kantor Pos agar pihak PT Pos Indonesia dapat menonaktifkan status 'Bayar' dana Bansos PKH menjadi 'Gagal Bayar'.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa strategi optimalisasi penyaluran bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) melalui PT Pos Indonesia di Kota Bandung telah mencapai tujuan yang diharapkan. Fokusnya adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi bantuan sosial untuk memastikan bantuan sampai kepada penerima yang berhak tepat waktu dan dalam kondisi baik. Pada artikel ini telah ditemukan bahwa efisiensi penyaluran Bansos PKH melalui PT Pos Indonesia di Kota Bandung berada pada tingkat yang cukup baik, namun masih memiliki ruang untuk perbaikan. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyalurkan Bansos PKH kepada KPM adalah 5 hari kerja, dan ditambah dengan 10 hari kerja untuk pengambilan Bansos PKH susulan. Manajemen penyaluran yang baik dan terorganisir telah meningkatkan efisiensi penyaluran Bansos PKH lebih optimal. Dengan menerapkan strategi-strategi yang diusulkan, diharapkan efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan dapat meningkat, sehingga program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bansos, Bantuan sosial,. (n.d.-a). Pos Indonesia. <https://www.posindonesia.co.id/en/articles/detail/pos-indonesia-distribusikan-bantuan-sosial-tunai-serentak-di-seluruh-indonesia>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. Pearson.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Ekonomi pandemi: bantuan sosial Penyaluran 'ke orang yang sudah meninggal', skema kebijakan dinilai 'tidak tepat sasaran'. (24 April 2020). BBC News Indonesia. Diakses pada tanggal 15 Juni 2021 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52399147>
- Priangga E.R. 2024. "Strategi Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Di Kota Bandung". Hasil Wawancara Pribadi: 24 Juni 2024, PT Pos Indonesia
- Miliki Banyak Cabang, PT Pos Indonesia (Persero) Berpotensi Jadi Kanal Penerimaan GNWU. (n.d.). Pos Indonesia. <https://www.posindonesia.co.id/en/articles/detail/miliki-banyak-cabang-pt-pos-indonesia-persero-berpotensi-jadi-kanal-penerimaan-gnwu>

Penyaluran bansos PKH ke 23.000 keluarga di Bandung. (1970, January 1). Antara News. <https://www.antarane.ws.com/foto/4097505/penyaluran-bansos-pkh-ke-23000-keluarga-di-bandung>

Program Keluarga Harapan (PKH). (n.d.). Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh#:~:text=Program%20Keluarga%20Harapan%20yang%20selanjutnya%20disebut%20PKH%20adalah,sejak%20tahun%202007%20Pemerintah%20Indone%20C2%ADsia%20telah%20melaksanakan%20PKH.>